



MITIGASI RISIKO INDUSTRI PARIWISATA: ANTISIPASI PEMERINTAH HADAPI RESESI EKONOMI

Aldhania Uswatun Hasanah ¹⁾; Dini Kurnia Putri ²⁾; Fania Mutiara Savitri ³⁾; Muhammad Akmal Muntafi ⁴⁾; Keisa Ghautsi Arifa ⁵⁾

Aldhania_uswatun_hasanaha_2001056008@walisongo.ac.id, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Abstract

The tourism sector has an important role as a source of foreign exchange earnings and can encourage national economic growth. This study examines the direction of government policy in dealing with an economic recession in the tourism sector. This study uses a descriptive qualitative method based on media analysis. The results show that the government has played an active role in determining the direction of economic policy in the tourism sector by implementing various excellent programs as a form of risk mitigation in anticipation of an economic recession.

Keyword: Policy, Risk Mitigation, Tourism Industry

Abstrak

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan devisa serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini mengkaji tentang arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi resesi ekonomi pada sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis pada analisis media. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah telah berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan ekonomi pada sektor pariwisata dengan menerapkan berbagai program-program unggulan sebagai bentuk mitigasi risiko yang dilakukan dalam mengantisipasi resesi ekonomi.

Kata Kunci: Industri Pariwisata, Kebijakan, Mitigasi Risiko

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tujuan nasional yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana yang tercantum pada pembukaan Undang undang Dasar Alinea keempat. Tujuan nasional tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokrasi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan negara dilakukan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam lampiran Undang Undang No. 25 tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004. Program pembangunan nasional meliputi pembangunan hukum, ekonomi, politik, agama, Pendidikan, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan serta pembangunan pertahanan dan keamanan.

Pembangunan nasional yang berfokus pada pembangunan ekonomi, Indonesia memiliki banyak sekali sumber yang dapat diandalkan, salah satunya dengan memanfaatkan industri pariwisata sebagai salah satu solusi yang dalam hal ini dapat menstabilisasi keseimbangan ekonomi. Menurut Undang-undang No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata dalam Pasal 1 (3): Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut (Jusmartinah, 2013). Industri Pariwisata merupakan bisnis sekaligus fenomena sosial. Dewasa ini modern menjelma menjadi salah satu industri yang diperhitungkan di dunia. UNWTO (2020) mencatat bahwa pada 2011, volume ekonomi pariwisata melebihi ekspor minyak, produk makanan, atau mobil. Pariwisata merupakan pemain utama dalam perdagangan internasional. Dengan nilai tambah sebagai “sinkless industry” (Bong, 2019).

Sektor pariwisata bisa dikatakan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat memberikan manfaat secara nyata serta berpotensi mendorong peningkatan ekonomi di suatu negara. Namun sejauh ini, krisis pariwisata seringkali terjadi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang sangat berdampak pada sektor



pariwisata adalah pandemic Covid-19 yang terjadi beberapa waktu lalu. Pandemi covid-19 merupakan kejutan besar bagi ekonomi global termasuk Indonesia, dimana terjadi penurunan ekonomi untuk paruh pertama decade ini, dan bisa dikatakan lebih lama apabila Tindakan penahanan wabah Covid-19 tidak efektif. Pandemi covid-19 menyebabkan gangguan yang cukup ekstrim pada rantai pasok global, dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen dan dampak negatif di sektor-sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata (Sugihamretha, 2020).

Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau multiplier effect yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya (Sugihamretha, 2020).

Maka oleh karenanya, pemerintah Kembali dituntut lebih konstruktif dalam menetapkan kebijakan yang setidaknya mampu meredakan situasi krisis ini sebagai upaya dalam perencanaan industri pariwisata yang lebih baik pasca pandemi, dengan kata lain, bahwa perlu adanya program mitigasi yang ditetapkan secara terstruktur dan terencana yang dapat menghidupkan Kembali industri pariwisata yang sempat mengalami kemerosotan tersebut sebagai inisiasi pemerintah dalam mengantisipasi resesi ekonomi pada sektor pariwisata, selain itu sebagai suatu gaya baru dalam new normal pariwisata, yang dapat memitigasi (mengupayakan pencegahan) terjadinya Kembali kluster baru penyebaran covid-19 (Ferdiansyah, 2020).

KAJIAN PUSTAKA

Industri Pariwisata dan pengaruh Kebijakan Pemerintah

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak pembangunan ekonomi di negara negara industri, negara kurang berkembang, hingga negara yang sedang berkembang. Sebagai industri global, industri pariwisata memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kegiatan ekonom negara jika pengelolaan dilakukan secara berkala dan serius, serta mampu memperoleh dukungan penuh dari pemerintah, industri pariwisata dapat berkembang sebagai penghasil devisa negara serta penggerak utama pembangunan ekonomi. Thailand, China, Hawaii, Korea Selatan, dan Jepang merupakan negara-negara yang cukup serius dalam mendukung dan menggalakkan industri pariwisata sehingga patut dijadikan contoh. Disamping keseriusan dari pihak swasta, peran signifikan pemerintah juga sangat penting dalam memajukan industri pariwisata.

Pembangunan industri pariwisata hanya bisa sukses bila dipimpin, didukung, dan difasilitasi oleh pemerintah, dikemukakan oleh pihak swasta, dan berbasis kemasyarakatan (Robertson, Kean & Moore, 2006). Hal ini disebabkan oleh peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulator dalam suatu negara sehingga dapat menggerakkan industri pariwisata. Faktor lainnya adalah karena kesuksesan pariwisata bergantung pada banyak faktor, seperti penyiapan infrastruktur yang baik, kemudahan transportasi, cakupan dan keberagaman jenis produk pariwisata, strategi pemasaran dan promosi yang penuh vitalitas, sistem informasi yang baik, pengelolaan destinasi wisata yang andal, harga yang kompetitif, dukungan lingkungan yang bersih dan sehat, serta yang tidak kalah penting adalah faktor keamanan, faktor



keselamatan, faktor kenyamanan yang tinggi, dan lain-lain. Peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan semua faktor tersebut sangat besar (Bong, 2019).

Dukungan pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur untuk mencapai lokasi wisata dan memberikan jaminan keamanan serta kenyamanan bagi wisatawan sangatlah diperlukan. Pemerintah Thailand dan China misalnya, begitu serius dalam mengelola industri pariwisatanya. Pemerintah kedua negara pun telah merasakan manfaat yang besar dari meningkatnya industri pariwisata ini sehingga menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan negara dan sumber daya manusianya. Demikian juga Korea Selatan dan Jepang, sebagai negara paling maju di Asia Pasifik, keduanya giat mengembangkan industri dan destinasi wisata mereka untuk menutupi kecenderungan industri manufaktur yang sedang bergeser menuju industri digital dan teknologi era 4.0 dan 5.0 (Bong, 2019).

Industri Pariwisata dan Risiko

Menurut pemerintahan Queensland Australia (Tourism Queensland, 2003), risiko pariwisata dapat dilihat dari sudut pandang yang lain berupa *Potential Tourism Shocks: direct and indirect shocks; Potential Tourism Impacts: short-term, middle-term, long-term impacts; Generic Responses: Pre Shocks-preparedness, Post Shock-response, recovery; Specific response Themes: Communication (short-term), Research (short/middle-term), Marketing (short/middle-term), Business/Industry development Assistance (medium-long term)*. Keunggulan dari pendekatan ini, yaitu menempatkan penekanan pada indirect shocks yang mempengaruhi wisatawan, sebagai contoh masalah fluktuasi mata uang, penyakit hewan (penyakit kuku dan mulut di Inggris pada 2001), dan kelesuan ekonomi (krisis keuangan Asia pada 1997). Pendekatan ini melihat dari sisi *pre-shocks (prevention and preparation)* dan *post-shock (response and recovery)*, yang diadopsi dari pendekatan PATA (Pacific Asia Travel Associate).

Menurut (Santi Palupi dan Sugiharto; 2014) dalam buku Manajemen Risiko, Krisi dan Bencana untuk Industri Pariwisata yang Berkelanjutan, menyampaikan bahwa industri pariwisata adalah industri yang bersifat padat karya yang sangat menekankan kualitas pelayanan. Dengan demikian risiko bisa terjadi pada setiap tahapan layanan, dapat menimpa siapa saja, dihadapi oleh semua jenis aset, baik aset berwujud (*tangible assets*) maupun aset tidak berwujud (*intangible assets*).

Dalam industri pariwisata, risiko diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu risiko, krisis, dan bencana. Perbedaan ketiganya terletak pada tingkat keparahan dampaknya dan proses terjadinya peristiwa. Apabila pengelolaan risiko tidak dapat dituntaskan maka risiko akan bertransformasi menjadi krisis, dan seterusnya akan berubah menjadi bencana. Namun, tidak semua risiko dapat dicegah seratus persen. Oleh sebab itulah banyak krisis dan bencana tetap terjadi walaupun sejak awal telah diantisipasi oleh pemerintah setempat maupun secara nasional. Tetapi paling tidak risiko terjadinya krisis dapat dikurangi sehingga krisis tidak fatal dan bencana yang fatal dapat dikurangi (Bong, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*). Teknik content analysis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan riset kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari



hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian (Iskandar, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Industri pariwisata terhadap pembangunan ekonomi Nasional

Menurut Leiper (1981), pariwisata merupakan suatu sistem terbuka dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan yang luas, mulai dari unsur manusia sebagai wisatawan, tiga unsur geografis yang meliputi; negara asal wisatawan, negara yang dijadikan tempat transit, serta daerah tujuan wisata dan unsur ekonomi yakni industri pariwisata (Ningsih, 2014). Era dewasa ini, pariwisata tidak hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang relative kaya, melainkan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama berkaitan dengan kegiatan sosial dan ekonomi.

Seiring dengan perkembangannya, industri pariwisata berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia dengan sumber daya alam serta kaya akan wisata alamnya yang sangat potensial untuk menumbuh-kembangkan industri berbasis pariwisata (Ningsih, 2014). Pariwisata bahkan telah berkembang menjadi salah satu industri terbesar di dunia yang ditandai dengan perkembangan jumlah kunjungan turis serta pendapatan yang diperoleh dari turis internasional (Nizar, 2011). Martin, Scrape, & Morales, (2004) mengemukakan bahwa Kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara dengan berkunjung dan mengonsumsi komoditas wisata di negara tujuan wisata (Yakub, 2019).

Pada neraca nasional, pengeluaran wisatawan dipandang sebagai invisible export perekonomian negara destinasi. Pengeluaran ini dapat dianggap sebagai stimulus bagi konsumsi yang kemudian diperoleh dari wisatawan mancanegara yang berkunjung (Yakub, 2019). Hal tersebut menunjukkan peningkatan produksi dan pendapatan, dimana keduanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga merupakan akumulasi produksi serta belanja dari output barang dan juga jasa, namun dapat mendorong perkembangan pariwisata.

Menurut penelitian Nizar (2011) dalam Yakub (2019) tentang pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menganalisis jumlah turis dan devisa pariwisata terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia pada tahun 2014, menunjukkan pariwisata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan pariwisata (devisa pariwisata dan jumlah turis) dan nilai tukar memiliki hubungan kausalitas timbal balik. Hal ini sebagai dampak dari peningkatan devisa pariwisata yang meningkatkan (apresiasi) kurs rupiah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa apresiasi atau depresiasi rupiah akan mendorong peningkatan atau penurunan devisa pariwisata dan jumlah turis dalam waktu berbeda serta ada hubungan positif dan pengaruh timbal balik antara jumlah turis dan devisa pariwisata. Studi LPEM terdahulu (2018) juga menunjukkan peran penting pariwisata terhadap penciptaan output dan PDB nasional. Dengan menggunakan analisis Model IO yang mempertimbangkan *induced effect*, diperkirakan pada 2018 lalu kontribusi pariwisata terhadap output nasional sebesar 5,89% dan kontribusi terhadap PDB mencapai 5,82%.

Sehingga dalam skala nasional, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia diperkirakan berada pada angka 4,1% Pemulihan pada sektor ini membutuhkan waktu yang lama. Kondisi pariwisata akan normal kembali pada 2024 dengan kontribusi diperkirakan 4,5 persen. Sementara itu, pada 2019 lalu, kontribusi sektor pariwisata sebesar 4,7 persen. (RA). Peran sektor pariwisata tersebut mampu mengurangi tekanan pada neraca pembayaran Indonesia yang pada 2018 lalu mencatat defisit USD7,1 miliar (BI, 2019). Pos neraca jasa perjalanan (pariwisata) dalam neraca perdagangan jasa dan neraca transaksi



berjalan selalu mencatat surplus yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. (Aponno, 2020)

Menurut (Chiu & Yeh, 2017), hubungan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi telah dianalisis dengan pendekatan hipotesis TLG (Tourism Led-Growth), ketika kondisi pariwisata berubah dengan menggunakan tiga spesialisasi pariwisata, yaitu (1) rasio penerimaan pariwisata internasional terhadap PDB; (2) rasio jumlah kedatangan wisatawan internasional dengan jumlah keberangkatan wisatawan internasional (rasio wisatawan); dan (3) rasio layanan perjalanan ekspor layanan komersial dengan layanan perjalanan impor layanan komersial (rasio layanan perjalanan). Tingkat spesialisasi pariwisata yang lebih tinggi, memiliki arti negara-negara menunjukkan lebih banyak melakukan pengembangan di bidang pariwisata. (Yakub, 2019)

Dalam literatur, hubungan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi dapat dikonfrontasi melalui dua pendekatan, yaitu: **Pertama**, pendekatan Keynesian tentang pengganda (multiplier), yang memperlakukan pariwisata internasional sebagai komponen eksogen dari permintaan agregat yang mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan, dan karena itu terhadap lapangan kerja melalui proses multiplier. Namun pendekatan ini banyak menerima kritik karena agak statis dan tidak memungkinkan untuk menyimpulkan dampak pariwisata dalam jangka panjang.

Kedua, pendekatan model pertumbuhan endogen dua sektor Lucas, yang penggunaannya untuk sektor pariwisata dipelopori oleh Lanza and Pigliaru (1995). Dalam model ini pariwisata dikaitkan dengan kondisi maksimisasi laju pertumbuhan. Apabila produktivitas menjadi elemen utama dari pertumbuhan, dengan asumsi kemajuan teknologi di sektor manufaktur lebih tinggi dibandingkan sektor pariwisata, maka spesialisasi pariwisata akan mendorong pertumbuhan. Hal ini bisa terjadi hanya apabila perubahan nilai tukar perdagangan (*terms of trade*) antara pariwisata dan barang-barang manufaktur lebih dari sekedar menyeimbangkan kesenjangan teknologi (*technological gap*) sektor pariwisata. Kondisi tersebut berlaku apabila elastisitas substitusi antara pariwisata dan barang manufaktur lebih kecil dari satu (*inelastic*).

Lebih lanjut, dengan mengacu pada teori hubungan perdagangan serta pertumbuhan, hubungan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi diidentifikasi bersifat kausalitas. Pola hubungan kausalitas ini berdasarkan pada tiga (3) hipotesis yang berbeda, diantaranya: 1) Bahwa hipotesis pertumbuhan yang bertumpu pada pariwisata (*tourism-Field economic growth hypothesis*) menganggap bahwa ekspansi pariwisata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi; 2) Hipotesis pertumbuhan pariwisata yang digerakkan oleh pertumbuhan ekonomi (*economic driven tourism growth hypothesis*) yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ekspansi pariwisata, serta 3) Hipotesis kausalitas timbal balik (*reciprocal causal hypothesis*), yang menganggap hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dan ekspansi pariwisata bersifat dua arah (*bidirectional*), dimana dorongan pada kedua variabel tersebut saling memberikan manfaat (Nizar, 2011).

Sehingga, pengakuan adanya hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dan ekspansi pariwisata sangat penting karena bisa memberikan implikasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan kebijakan yang relevan. Namun demikian, apabila ditemukan tidak adanya hubungan kausal antara ekspansi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi, hasilnya dapat digunakan sebagai indikasi untuk menunjukkan efektivitas strategi promosi pariwisata. Beberapa argumen lain yang menilai keterkaitan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada dampak ekonomi makro dari pariwisata, yaitu:

Pertama, pariwisata memiliki dampak langsung terhadap perekonomian, antara lain terhadap penciptaan lapangan kerja, redistribusi pendapatan, dan penguatan neraca



pembayaran. Belanja turis, sebagai bentuk alternatif dari ekspor memberikan kontribusi berupa penerimaan devisa (neraca pembayaran) dan pendapatan yang diperoleh dari ekspansi pariwisata. Penerimaan devisa dari pariwisata juga bisa digunakan untuk mengimpor barang-barang modal untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, yang pada gilirannya menyebabkan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, efek stimulasi (*induced affects*) terhadap pasar produk tertentu, sektor pemerintah, pajak dan juga efek imitasi (*imitation effect*) terhadap komunitas. Salah satu manfaat utama bagi komunitas lokal yang diharapkan dari pariwisata adalah kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama peningkatan pendapatan dan pekerjaan baru di daerah (Aponno, 2020).

Respon Kebijakan Pemerintah terhadap Pemulihan ekonomi pada sektor Pariwisata

Melalui media, secara resmi Pemerintah melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menyusun sejumlah strategi dalam rangka memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemic covid-19, Kemenpera kementerian akan menerapkan tiga strategi dalam mempercepat pemulihan pariwisata di Indonesia, diantaranya: 1) Strategi Inovasi, yakni strategi yang akan lebih fokus terhadap pemanfaatan teknologi sebagai media interaktif yang intensif melalui pendekatan-pendekatan big-data, pendekatan kekinian yang berperan dalam memetakan baik dari segi potensi maupun penguatan serta memastikan para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mampu bertahan serta berkembang secara signifikan. 2) Strategi adaptasi, dimana dalam strategi adaptasi ini pemerintah mengutamakan Kesehatan dan keselamatan dalam setiap destinasi pariwisata serta dalam setiap lini ekonomi kreatif. Dalam strategi adaptasi, khususnya pada kondisi covid-19 ini salah satunya untuk memastikan sertifikasi SUCI yang berkaitan dengan cleanliness atau kebersihan, healthy atau Kesehatan, safety atau keamanan dan juga inviren sustainability atau kelestarian alam. Sertifikat ini akan memberikan jaminan kepada masyarakat atau wisatawan bahwa produk serta pelayanan wisata yang diberikan telah berstandar *protocol CHASE*. 3). Kolaborasi dengan semua pihak stakeholder, dimana pemerintah akan melakukan Kerjasama secara berkelanjutan dengan semua pihak untuk memajukan pariwisata di kanca nasional dan internasional.

Selain program melalui strategi-strategi tersebut, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan wisata, maka pemerintah paling tidak akan melakukan beberapa tahapan upaya meningkatkan kinerja pariwisata di Indonesia, beberapa diantaranya adalah: 1) Mempercepat penyelesaian infrastruktur. Pemerintah akan melakukan penyelesaian pembangunan dan infrastruktur sesegera mungkin terutama bagi daerah tujuan destinasi wisata yang saat ini tengah difokuskan oleh pemerintah. 2) Mendorong pengembangan atraksi wisata antara lain di wilayah perbatasan atau *pro poor tourism* dengan menggelar berbagai atraksi budaya secara periodic. 3) Meningkatkan kualitas amenities dilakukan melalui upaya pembebasan lahan untuk pengembangan amenities di destinasi prioritas. 4) Memperkuat promosi wisata nasional untuk meningkatkan lama tinggalnya para wisatawan mancanegara. 5) Mendorong investasi dan pemilihan dalam pengembangan destinasi serta peningkatan sumber daya Manusia pariwisata, perbaikan dukungan data dan informasi seperti penerbitan publikasi standarisasi dan juga kegiatan usaha klasifikasi pengeluaran wisata mancanegara. 6) Menyusun standar prosedur manajemen krisis kepariwisataan dan membentuk forum manajemen krisis kepariwisataan di sejumlah daerah.

Melalui seminar nasional yang bertema “Arah kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2023” oleh Dr. Ir. Wawan Rusiawan M.M selaku (Direktur Kajian Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yang di publish melalui Youtube resmi Pusat Kajian Anggaran DPR RI. Beliau menjelaskan bagaimana arah kebijakan yang diambil khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2023 ini. Bahwa salah satu isu



yang sangat kompleks di era new normal ini yang berdampak pada perlambatan perekonomian di bidang pariwisata ditunjukkan oleh penurunan kunjungan wisman selama pandemic covid-19.

Namun ada harapan pemulihan seiring dengan relaksasi kebijakan imigrasi dan peningkatan mobilitas. Teks tersebut juga memberikan informasi mengenai pintu masuk utama bagi wisman, penggunaan visa kunjungan, dan pengeluaran per hari wisman. Selanjutnya, pada tahapan pemulihan dan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tahapan ini meliputi penyelamatan, resiliensi, pemulihan, percepatan pemulihan, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan. Pentingnya peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan produk, serta pendorong wisata nusantara juga ditekankan. Digitalisasi juga dianggap penting dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Meski demikian, pemulihan pariwisata masih menghadapi tantangan, seperti penurunan angka kunjungan wisman dan pengeluaran mereka. Proyeksi pertumbuhan pariwisata lebih moderat, dan kondisi perekonomian yang tidak stabil juga menjadi faktor yang mempengaruhi prospek ke depan. terdapat beberapa poin terkait peran swasta, pemerintah, dan isu inklusivitas, serta isu-isu berkelanjutan dalam arah kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa yang akan datang.

Peran swasta yang lebih besar dalam arah kebijakan ke depan, peran swasta atau sektor swasta diharapkan dapat menjadi lebih besar. Ini mungkin mengakibatkan peran pemerintah berkurang dalam hal porsi, sedangkan peran swasta akan ditingkatkan, Perluasan pemasaran pariwisata, meskipun masa pandemi, upaya promosi dan pemasaran pariwisata tetap perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada klien, konsumen, dan publik bahwa pariwisata aman untuk dikunjungi dan diminati.

Program "*Indonesia Spice Up the World*": Program ini merupakan salah satu highlight program yang akan diperkuat dan diperluas ke depan. Hal ini terkait dengan isu inklusivitas, yang bertujuan untuk memperkuat wisata dan melibatkan banyak masyarakat, terutama dalam pengembangan desa wisata. Revitalisasi Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Program-program terkait dengan revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif, termasuk kota kreatif dan kota-kota warisan, juga akan menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan isu inklusivitas dalam kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam arah kebijakan ke depan, isu-isu berkelanjutan seperti masalah kesehatan, standar pelayanan, pengelolaan limbah, air bersih, dan daya dukung lingkungan di setiap destinasi akan menjadi fokus. Upaya pemenuhan daya dukung lingkungan di setiap destinasi pariwisata juga akan diperhatikan dalam rangka menjaga keberlanjutan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, peran swasta diharapkan akan diperbesar, isu inklusivitas akan diperkuat, dan isu-isu berkelanjutan akan menjadi fokus dalam arah kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2023 dan kedepannya.

Terdapat tiga isu utama yang menjadi persoalan, yakni: produktivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. pentingnya isu-isu ini dalam konteks nasional dan mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci dengan mempertimbangkan isu-isu terkait. Dengan mengaitkan isu-isu ini dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan mengacu pada pesan utama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa pertumbuhan ekonomi harus terus ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja. Hal ini dicapai melalui kebijakan-kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menerapkan prinsip inklusivitas. Dalam konteks pariwisata, indikator kinerja utama yang diperhatikan termasuk kontribusi devisa, jumlah wisatawan mancanegara (Wisman), ekspor produk pariwisata, nilai tambah, dan tenaga kerja. Indikator-indikator ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan pengembangan pariwisata yang berkualitas, memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja. Beberapa



informasi terkait dengan pemulihan dan proyeksi pertumbuhan pariwisata global, terutama yang berkaitan dengan pariwisata dalam negeri (domestik) di Asia Pasifik.

Berdasarkan data UNWTO, pada Januari 2022, pertumbuhan pariwisata di Asia Pasifik masih mengalami perlambatan dibandingkan dengan wilayah lain seperti Eropa dan Amerika. Secara global, pertumbuhan pariwisata masih 71% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi. Asia Pasifik mengalami penurunan terparah dengan 93% dibandingkan dengan sebelum pandemi. Hal ini disebabkan oleh pembatasan perjalanan, terutama di Tiongkok yang belum membuka pintunya sepenuhnya untuk warganya. Oleh karena itu, pertumbuhan pariwisata pada tahun 2022 diperkirakan akan lebih moderat dan tidak terlalu optimis, mengingat juga adanya proyeksi perlambatan perekonomian dan kenaikan harga komoditas serta inflasi energi. Proyeksi pertumbuhan sektor Travel and Tourism pada tahun 2022, di mana diperkirakan akan terjadi peningkatan sekitar 31% dalam pengeluaran wisatawan domestik dan 93% dalam pengeluaran wisatawan internasional.

Namun, angka ini masih menjadi tantangan mengingat kondisi yang sulit akibat pandemi dan kendala ekonomi yang dihadapi. Mengenai performansi kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari hingga Juli 2022 mencapai sekitar 890 ribu, yang masih jauh dari target pemerintah untuk mencapai minimal 1,8 juta kunjungan pada tahun tersebut. Rata-rata pengeluaran per kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 dan 2021, dengan kenaikan dari 2165 USD menjadi 2300 USD. Negara-negara seperti Spanyol, Thailand, dan Portugal memiliki pengeluaran per kunjungan tertinggi. Selain itu, terdapat informasi tentang negara-negara dengan lama tinggal tertinggi, di mana Tiongkok tidak mengizinkan perjalanan ke luar negeri, namun tetap ada wisatawan Tiongkok yang berada di negara-negara lain termasuk Indonesia. Sedangkan rata-rata pengeluaran harian wisatawan mancanegara, dengan Spanyol memiliki angka tertinggi sebesar 74 USD, diikuti oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Jerman.

Pemulihan sektor pariwisata memerlukan langkah-langkah seperti manajemen risiko, pemberian insentif dan stimulus dari pemerintah, peningkatan kualitas destinasi pariwisata, digitalisasi, pengembangan SDM, dan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, terdapat penekanan pada pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian dari sektor pariwisata. Digitalisasi menjadi penting dalam pengembangan ekonomi kreatif, dengan pelaku industri dan produk harus beradaptasi dengan platform e-commerce dan marketplace. Program akselerator, fasilitasi perluasan pasar, dan koneksi antara pelaku ekonomi kreatif dengan forum industri juga ditekankan. Upaya pengembangan SDM melalui upskilling, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi juga menjadi fokus dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa mendatang.

Adapun program-program yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) di bidang industri. Beberapa langkah pemulihan yang diambil termasuk peningkatan kapasitas dan kapitalisasi destinasi, peningkatan efisiensi dan daya saing usaha, serta pengembangan produk dan pasar. Terdapat berbagai macam program yang ditujukan untuk para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata, dengan fokus pada meningkatkan resiliensi dan daya saing usaha mereka. Beberapa program yang disebutkan dalam teks tersebut antara lain:

- 1) Pelatihan konten komersial: Program ini menyasar para pelaku ekonomi kreatif dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas konten komersial mereka.
- 2) Konsultasi dan bantuan pengurusan sertifikat kekayaan intelektual: Program ini membantu pelaku ekonomi kreatif dalam mengurus sertifikat kekayaan intelektual mereka, seperti hak cipta dan merek dagang.



- 3) Promosi pariwisata: Program ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia baik secara domestik maupun internasional.
- 4) Bantuan mendapatkan sertifikat Cuci Bayar Pajak (CBP): Program ini membantu para pelaku ekonomi kreatif dalam mendapatkan sertifikat CBP, yang merupakan persyaratan untuk mengikuti program pemulihan ekonomi.
- 5) Program Beli Kreatif Lokal: Program ini ditujukan bagi para pelaku ekonomi kreatif, dengan tujuan mendorong penggunaan produk-produk kreatif dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam membuka pasar dan meningkatkan konsumsi melalui e-katalog. Hal ini memungkinkan produsen lokal terhubung dengan konsumen dan mempermudah akses pasar bagi produk-produk kreatif lokal. Konektivitas dan kolaborasi juga menjadi hal penting dalam program-program ini, dengan upaya untuk membangun jaringan dan kerja sama antara berbagai pihak terkait dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuan dari program-program ini tidak lain untuk mencapai pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas produk dan daya saing, serta meningkatkan konektivitas dan kolaborasi antara pelaku industri.

PENUTUP

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan devisa serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menyatakan bahwa pengembangan pariwisata dapat mendatangkan pendapatan valuta asing, memacu investasi dalam infrastruktur baru dan persaingan dalam industri pariwisata lokal, merangsang industri lain yang terkait dengan industri pariwisata, dan menyediakan lapangan kerja. Sehingga pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh bagaimana keberlangsungan sektor pariwisata dalam suatu negara. Dalam menghadapi paceklik serta krisis ekonomi khususnya pada sector pariwisata akibat pandemi, pemerintah telah merancang berbagai program dalam bentuk kebijakan untuk mengantisipasi kemerosotan ekonomi dalam bidang pariwisata yang berkepanjangan sebagai bentuk pemulihan yang efisien dan berdampak. Terdapat beberapa langkah pemulihan yang diambil termasuk peningkatan kapasitas dan kapitalisasi destinasi, peningkatan efisiensi dan daya saing usaha, serta pengembangan produk dan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aponno, C., (2020). KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI MALUKU. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, sosial, & Humaniora*, 02(05), pp. 111-112.
- Bong, S., (2019). *MANAJEMEN RISIKO, KRISIS, DAN BENCANA UNTUK INDUSTRI PARIWISATA YANG*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ferdiansyah, H., (2020). PENGELOLAAN MITIGASI KRISIS PARIWISATA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM MENGHADAPI FASE NEW NORMAL (Studi Kasus Di Desa Wisata Nglanggeran Yogyakarta). *Bina Wahyu*, 15(03), p. 12.
- Iskandar, (2008). *Metodologi penelitian pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: GP Press.
- Jusmartinah, M. S. d. R., (2013). UPAYA PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN BULUNGAN. *Jurnal Teknik WAKTU Volume 11 Nomor 01* , 11(01), p. 10.
- Ningsih, C., (2014). Sinergitas Industri Kreatif Berbasis Pariwisata dengan Strategi Pembangunan Industri Nasional Menuju Globalisasi. *Manajemen Resort & leisure*, 11(01), pp. 61-62.



- Nizar, M. A., (2011+). TOURISM EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA. MPRA, p. 25.
- RI, P. K. A. D., (2022). Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata Pada Tahun 2023. [Online]
Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=JOUaEIpSwgo>
[Accessed Kamis 05 2023].
- Sugihamretha, I. D. G., (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. The Indonesian Journal of Development Planning, 04(02), p. 16.
- TV, M., (2021). Strategi Kemenparekraf Pulihkan Pariwisata Indonesia. [Online]
Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=qw6Czo6aGD4>
[Accessed Kamis 05 2023].
- Yakub, A. p., (2019). Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Bina Ekonomi, 23(02), pp. 39-41.